

BAB V

KESIMPULAN

Jatuhnya Soeharto pada bulan Mei 1998 membuka peluang bagi elit Papua dan aktivis muda untuk mengungkapkan keinginan mereka, di dalam Indonesia dan di luar negeri untuk mewujudkan Papua merdeka. Upaya-upaya mereka untuk memperoleh dukungan dari dunia luar tidak membuahkan hasil, kecuali dari Nauru dan Vanuatu pada saat pertemuan *Pacific Islands Forum* (sebelumnya dikenal sebagai *South Pasific Forum*) di Kiribati pada bulan Oktober 2000.

Siklus konflik di Papua yang terjadi selama lebih dari empat dekade telah membawa dampak yang luas terhadap rakyat Papua. Situasi seperti ini tidak pernah disikapi oleh pemerintah Indonesia secara bijaksana, justru sebaliknya menerapkan kebijakan-kebijakan instan secara sepihak yang makin memperkuat siklus konflik tersebut. Akar persoalan konflik di Papua sebenarnya terletak pada status politik Papua, sebagai wilayah yang diintegrasikan ke Indonesia pada tahun 1969 dengan didukung oleh masyarakat internasional.

Proses politik yang tidak memberikan ruang partisipasi politik kepada orang Papua telah memicu resistensi rakyat Papua sejak tahun 1965 sampai sekarang. Resistensi rakyat diwujudkan dalam berbagai bentuk, dari pemberontakan bersenjata, deklarasi politik, pengibaran bendera, demonstrasi damai, perusakan aset milik

disikapi pemerintah Indonesia dengan melakukan operasi militer dan menerapkan kebijakan politik yang bertujuan untuk membungkam protes rakyat.

Sebab utama sentimen suku nasionalis orang Papua yang muncul pada era kolonial Belanda tumbuh menjadi keinginan yang keras untuk membentuk negara merdeka sendiri. Rakyat Papua tidak pernah mendapatkan peran untuk dimainkan dalam proses dekolonisasi tahun 1961-1969. Mereka menyaksikan ketidakadilan, kecurangan, dan manipulasi terjadi pada saat PEPERA tahun 1969. Itulah sebabnya hingga hari ini elite Papua menyerukan pada Indonesia, Belanda, Amerika Serikat, dan PBB agar sejarah dimasukkannya Papua ke dalam Indonesia dipelajari kembali. Juga ada elemen psikologi, ketakutan pada dominasi dan 'punahnya' kelompok minoritas.

Pada 2001, negara-negara yang tergabung dalam Forum Kepulauan Pasifik mengadakan pertemuan di Aiwo Nauru. Mereka sepakat untuk mendukung lepasnya Papua dari Indonesia. Asumsi mereka, pemerintah Indonesia sama sekali tidak memperhatikan kesejahteraan dan hak asasi rakyat Papua. Upaya Vanuatu dalam menyelesaikan masalah antara pemerintah Indonesia dan Papua adalah dengan menawarkan diri kepada kedua belah pihak untuk menjadi tempat yang netral guna membicarakan jalan keluar pemecahan masalah yang telah berlangsung selama 40 tahun terakhir ini. Keinginan Vanuatu tersebut disebabkan oleh perasaan bahwa Papua adalah saudara sesama ras Melanesia. Pembicaraannya diadakan di Port Vila tanggal 26-28 Juli 2004

Pada tanggal 8 September 2000 dalam United Nations Millenium Summit di New York, Pemerintah Republik Vanuatu melalui Perdana Menteriya saat itu Barak Sope memberikan pernyataan dukungan terhadap Papua. Vanuatu mendukung upaya rakyat Papua Barat untuk menentukan nasibnya sendiri dan peresmian pembukaan kantor perwakilan kelompok separatis Papua Barat di Port Vila Vanuatu tanggal 22 Maret 2003 merupakan sikap resmi pemerintah Vanuatu yang mengacu pada pernyataan PM Vanuatu dalam Sidang Tahunan Forum Pasifik Selatan bulan Agustus 2002 lalu serta dalam pidatonya pada Sidang Umum PBB tanggal 18 September 2002. Kantor perwakilan Papua tersebut sebagai wadah perjuangan aspirasi rakyat Papua Barat untuk merdeka yaitu perwakilan seluruh kekuatan perjuangan Papua Barat yang ada. Dengan dukungan yang terus menerus dari pemerintahan Vanuatu dan juga dengan pembukaan Kantor Perwakilan Rakyat Papua di Port Vila, ada kemungkinan jalan baru telah lahir. Pemerintah Vanuatu sudah akan mengangkat masalah Papua Barat dihadapan Sidang Umum PBB.

Pemerintah Indonesia sebelumnya sempat melancarkan protes keras terhadap pemerintah Vanuatu berkaitan dengan izin yang diberikan pemerintah setempat terhadap pembukaan Kantor Perwakilan Diplomatik Organisasi Papua Merdeka dan Gerakan Aceh Merdeka di negara kawasan Pasifik Selatan tersebut. Indonesia telah mengirimkan nota diplomatik sebanyak dua kali kepada pemerintah Vanuatu dalam

Pemerintah Vanuatu menyatakan keberpihakannya pada perjuangan penentuan nasib sendiri di Papua. Pernyataan tersebut disampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia yang sebelumnya mempertanyakan pembukaan Kantor Perwakilan Rakyat Papua di Vanuatu. Dukungan itu menjadi kebijakan Luar Negeri Vanuatu tidak hanya untuk kawasan Asia Pasifik tetapi juga di seluruh dunia.

Kantor Perwakilan yang dibuka sejak 26 Maret 2003 itu tidak memiliki status resmi yang mewakili adanya hubungan diplomatik tetapi menjadi sebuah kantor pusat yang akan mendukung aliran informasi tentang isu-isu yang berkaitan dengan rakyat Papua Barat. Hal tersebut sudah cukup memberikan indikasi dukungan Vanuatu terhadap Gerakan Papua Merdeka.

Alasan rakyat Vanuatu menginginkan Papua merdeka yaitu dikarenakan 3400 tahun yang lalu bangsa Vanuatu telah tiba di tempatnya sekarang sebelum orang-orang Eropa menetapkan Australia dan New Zealand dan karena perjuangan tahun 1980 untuk kemerdekaan sehingga Vanuatu merasa terpanggil untuk mendukung kebebasan Kaledonia Baru dan Papua Barat.

Sejak lama, sejumlah negara Pasifik yang berjumlah belasan itu ingin membentuk gugusan negara-negara dengan mayoritas rumpun Melanesia. Satu-satunya "negara" yang belum berdiri sendiri adalah Papua Barat. Kini menyusul Maluku Selatan, meski hanya terdiri atas negara-negara kecil, mereka mendapat sokongan kuat Australia dan Selandia Baru. Cita-cita mereka ingin membuat

pertambangan, dan pariwisata. Papua Barat termasuk kelompok yang diincar karena memiliki kekayaan alam melimpah. Maka tidak mengherankan jika Papua didorong

untuk memisahkan diri dari Indonesia dalam "Desentralisasi" baru Pasifik